OPD : Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak .

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9	
Nama Kebijakan/Program <i>i</i> Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN	DAN RENCANA KEDEPAN	PENGUKURAN HASIL		
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja	
Program : Program Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah	Sesuai dengan Inpres No 9 Tahun 2000 dan Permendagri No 67 Tahun 2011 , Perwako No.26 Tahun 2018	Akses :	Sering terjadi mutasi dan rotasi	sering terjadi mutasi dan rotasi	Terwujudnya Pembangunan yang Responsif Gender	Pengutan kelembagaan PUG yang terdiri dari : Pokja PUG, Focal Point	Sesuai dengan Inpres No 9 Tahun 2000 dan Permendagri No 67 Tahun 2011 , Perwako No.26 Tahun 2018	Kegiatan 1 : Pelaksanaan Pelatiihar PUG/PPRG dan GAP/GBS INPUT ; 50.000.000,-	
	Jumlah anggaran APBD Kota Padang Panjang Rp.50.000.000	Komitmen Kepala OPD	Kurangnya dukungan dari pimpinan	Kurangnya dukungan dari pimpinan		Melaksanakan Pelatihan PUG, GAP/GBS bagi PPRG, Focal Pointa dan PUG bagi Masyarakat	Seluruh OPD sudah mengacu pada PPRG	Output : Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan PUG/ PPRG GAP/GBS 104 ORANG	
	Belum seluruh OPD membuat anggaran yang responsif Gender	terbatas SDM dalam menyusun ARG	tempat pelatihan kurang menarik	Tidak adanya punishment dan Reiword		Mengoptimalkan Focal Point		Outcome : Terpenuhinya Perencanaan Penganggaran Yang Responsif Gender	
Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Pembangunan yang tidak responsif Gender mempunyai dampak terhadap kualitas pembangunan contoh Trotoallkecil tidak aman untuk jalan kaki, WC Pada pelayanan Public	Kontrol		Kurangnyanya partisipasi dalam evaluasi dari masyarakat terhadap PPRG		Membuat regulasi untuk pelaksanaan PUG		Kegiatan 2 :	
Tujuan Kegiatan :		Belum optimal pengawasan pelaksanaan PPRG						Pembuatan Profil Gender dan Anak	
Terpenuhinya kegiatan pembangunan yang responsif gender		<b>M</b> anfaat						Output :	

	<u> </u>			•
Pembanguan				Terpenuhinya kegiatan pembangunan yang responsif gender
Tersedianya Informasi data terpilah untuk perencanaan				Tujuan Kegiatan :
: əmoɔtuO				Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan pengembangan Sistim Informasi Gender dan Anak.
			Responsif Gender	
Jumlah Buku Profil yang dicetak			Meningkatnya SDM OPD dalam membuat Perencanaan yang	Kegiatan :

15690120 198902 1 001 PADANG PANIANG 03 Maret 2021

## MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/		ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGL	JRAN HASIL
Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program:		Akses :				Pemberdayaan Penyandang Disabilitas yang terdiri dari :		Mariatar 4
Rehabilitasi Sosial	Sesuai dengan amanat MDGs tahun 2015 yang ditindaklanjuti dengan SDG's 2030 bahwa pendidikan harus dapat diberlakukan untuk semua kelompok	Disabilitas memiliki ketertabatas fisik dan kemapuan untuk mandiri dan berusaha secara ekonomi	Kurang berperannya pendamping dalam penganan disabilitas	Kurangnya dukungan Pemangku kebijakan kepada penyandang disabilitas	Meningkatnya kemandirian penyandang disabilitas	a. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang disabilitas	Penyandang Disabilitas pada tahun 2020 adalah sebanyak 254 orang terdiri dari 153 laki- laki dan 101 orang perempuan	Kegiatan 1 : Pemberdayaan penyandang Disabilitas
	Jumlah penduduk Kota Padang Panjang Tahun 2020 58.140 Yang terdiri dari Laki-laki 30.156 Dan perempuan 28.892	perasaan malu memiliki anggota keluarga penyandang cacat	SDM belum responsif terhadap kebutuhan disabilitas	Disabilitas bem]lum menjadi prioritas sasaran kegiatan OPD			Sebagian besar penyandang disabilitas merupakan masyarakat kelas ekonomi menegah kebawah	Input Rp. 1.621.733.000
	Penyandang Disabilitas pada tahun 2020 adalah sebanyak 254 orang terdiri dari 153 laki- laki dan 101 orang perempuan	Rata - rata berasal dari keluarga yang tidak mampu	Data belum menjadi rujukan dalam penyusunan perencanaan	Stigma masyarakat bahwa penyandang disabilitas tidak akan bisa melakukan aktifitas layaknya orang normal		b. Membentuk kelompok usaha penyandang disabilitas netra yang produktif		Output : Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan pangan
	Anak Disabilitas 85 laki -laki 53 dan PR 32		Belum Maksimal Koordinasi dengan OPD tentang pemanfaatan Data	Minimnya peran masyarakat untuk mengoptimalkan (memberdayakan) disabilitas				Outcome : Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas
	Sebagian besar penyandang disabilitas merupakan masyarakat kelas ekonomi menegah kebawah		Belum optimalnya pembinaan terhadap disabilitas	Adanya diskriminasi terhadap disabilitas		c. memonitor dan evaluasi usaha yang dilakukan oleh penyandang disabilitas netra	Peningkatan SDM pengelola PPDI	
Kegiatan :	Penyandang Disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan					d. Meningkatkan koordinasi OPD Provinsi serta Kab/Kota	Pendidikan dan pelatihan bagi disabilitas	
Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis						2. Pemberdayaan Lansia Terlantar		Kegiatan 2 : Ketersediaan Bantuan Pangan untuk Lansia Terlantar
Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Disable dan Lansia Terlantar						AN TAI		

PADANG RANANG. 3 Maret 2021

Drs de MÁN BIN NUR.Msi.